

<b>Submission</b>	<b>Review Process</b>	<b>Revised</b>	<b>Accepted</b>	<b>Published</b>
06-12-2021	10-12 s/d 06-01-2021	10-01-2021	24-01-2021	31-01-2021

*Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 2 No.1, Januari 2021 (25-39)*

**Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang**

**Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang**

**Agung Pratama Putra**

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: agungpratamaputras.sos@gmail.com

**Nurhuda**

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: Norhuda\_uin@radenfatah.ac.id

**Nico Oktario Adytyas**

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: nadytyas@gmail.com

**ABSTRACT**

This research explains the institutionalization of Islamic political parties in Palembang City can affect the results of the legislative elections and the existence of voters, which at the time of the 2019 legislative elections in Palembang City, the votes and seats of Islamic political parties experienced very significant changes in terms of the number of votes. and legislative seats. Islamic political parties that experienced an increase in the number of votes and legislative seats, namely the Prosperous Justice Party (PKS) when the 2014 legislative general election received three seats but in the 2019 legislative general election it got five seats, while the Islamic political parties which experienced a decrease in the number of votes and legislative seats, namely the Party The Development Association (PPP) when the 2014 legislative election won two seats, but in the 2019 legislative general election, it only got one seat.

The reason the author chose the title Institutionalization of Islamic Political Parties in Palembang City is due to the extent to which Islamic parties have or have not been institutionalized, this research on the institutionalization of political parties uses the theory of Vicky Randall and Lars Svasand political parties are considered institutionalized if there are four degrees of institutionalization such as Degree of System, Degree of Value Identity , Degree of Decision Autonomy and Degree of Public Knowledge. Based on the theory used, the results of this study, among others, prove that PKS can be said to have been institutionalized and PPP has not been institutionalized based on the four degrees of political party institutionalization theory concept according to Vicky Randall and Lars Svasand. So that it can be directly proven by the results of research findings where the institutionalization of PKS and PPP parties has similarities and differences between the two Islamic political parties in absorbing the people's aspirations and fighting for the interests of Muslims in Palembang City.

Keywords: *islamic political parties, legislative general election, PKS and PPP*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menjelaskan tentang pelembagaan partai politik Islam di Kota Palembang dapat mempengaruhi hasil suara pemilihan umum legislatif dan eksistensi pemilihnya, yang dimana pada saat pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Palembang suara dan kursi partai politik Islam mengalami perubahan suara yang sangat signifikan dalam hal perolehan jumlah suara dan kursi anggota legislatif. Parpol Islam yang mengalami kenaikan perolehan jumlah suara dan kursi legislatif yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketika pemilihan umum legislatif 2014 mendapatkan tiga kursi namun pada pemilihan umum legislatif 2019 mendapatkan lima kursi sedangkan partai politik Islam yang mengalami penurunan perolehan jumlah suara dan kursi legislatif yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ketika Pemilu legislatif 2014 mendapatkan dua kursi, namun pada pemilihan umum legislatif 2019 hanya tersisa mendapatkan satu kursi.

Alasan penulis memilih judul Pelembagaan Partai Politik Islam di Kota Palembang dikarenakan sejauh mana partai Islam telah atau belum terlembaga, penelitian pelembagaan partai politik ini menggunakan teori Vicky Randall dan Lars Svasand partai politik dianggap terlembaga apabila didalamnya terdapat empat derajat pelembagaan seperti Derajat Kesisteman, Derajat Identitas Nilai, Derajat Otonomi Keputusan dan Derajat Pengetahuan Publik. Berdasarkan teori yang digunakan, maka hasil penelitian ini antara lain membuktikan bahwasannya PKS dapat dikatakan telah terlembaga dan PPP belum terlembaga berdasarkan empat derajat konsep teori pelembagaan parpol menurut Vicky Randall dan Lars Svasand. Sehingga dapat dibuktikan langsung dengan hasil penemuan penelitian dimana pelembagaan partai PKS dan PPP memiliki sisi persamaan maupun perbedaan kedua partai politik Islam tersebut dalam menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di Kota Palembang.

Keywords: *partai politik islam, pemilihan umum legislatif, PKS dan PPP*

## **PENDAHULUAN**

Kegiatan pesta demokrasi yang telah selesai dilaksanakan, masih memiliki sebagian persoalan masalah khususnya bagi partai Islam yang ada di Kota Palembang. Beberapa partai Islam yang mengalami problematika perolehan jumlah suara dan kursi partai politik Islam bahkan sebagian partai politik Islam, ada yang mengalami kenaikan jumlah suara dan kursi seperti halnya PAN (Partai Amanat Nasional) yang berhasil meraih enam kursi mendapatkan jatah Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, kemudian disusul oleh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Sedangkan partai Islam yang mengalami penurunan jumlah suara dan kursi atau bahkan tidak mendapatkan kursi sama sekali seperti, yang dialami oleh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang sebelumnya di Pemilihan Umum 2014 dua kursi kali ini di Pemilihan Umum 2019 hanya mendapatkan satu kursi, sedangkan yang paling mengesankan dialami oleh PBB (Partai Bulan Bintang) sebelumnya pada Pemilihan Umum 2014 dua kursi kali ini di Pemilihan Umum 2019 tidak mendapatkan kursi.

Alasan tersebut yang membuat penulis melakukan sebuah penelitian karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi sebagai tugas akhir seorang mahasiswa yang diajukan guna untuk memperoleh gelar akademik di sebuah Perguruan Tinggi (PT). Menariknya dari penelitian yang ditulis atau diteliti oleh penulis adalah bagaimana partai politik Islam yang dianggap merupakan wadah perjuangan aspirasi umat Islam baik dari simbol, atribut maupun gerakan basis massa dan ideologi atau platform partai Islam. Disinilah penulis mencoba meneliti partai politik Islam dengan menggunakan teori pelembagaan partai politik, sejauh mana partai politik Islam sudah atau belum terlembaga.

Pelembagaan partai politik menurut Huntington adalah proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya. Huntington menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan politik yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung. (Romli, 2008)

Pertanyaan sosiologis yang muncul disini adalah, apakah ditemukan pemilih yang ada di Indonesia lebih kepada identifikasi partai (*party identification*) atau identifikasi sosok (*figure identification*). Partai yang bernafaskan agama lebih membuat orang tertarik karena faktor identifikasi partainya sendiri. Para warga Nahdliyin dengan cepat mengidentifikasi dirinya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan kader simpatisan maupun pengurus Muhammadiyah memilih berafiliasi dengan Partai Amanat Nasional (PAN), sementara kelompok-kelompok Islam yang lebih fundamental dan berbasiskan kampus mengidentifikasi mereka dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sedangkan gabungan Ormas Islam tradisional mengidentifikasi dirinya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dua alasan tersebut sebetulnya dapat saling menunjang. Sebab, kelemahan seorang tokoh politik dapat diimbangi oleh visi, organisasi dan disiplin partai. Sebaliknya kelemahan dalam visi dan organisasi partai dapat diimbangi oleh inspirasi, kepemimpinan, dan kharisma seorang pemimpin politik. Kalau dua jenis identifikasi ini menghadapi terlalu banyak kesulitan (partainya centang-perentang dan pemimpinnya tanpa integritas) besar kemungkinan orang tidak mau memilih, partai Islam tersebut dan mulai berfikir untuk tidak memilih atau golongan putih (golput). (Thaha, 2004)

Pelebagaan partai politik Islam di Kota Palembang dapat mempengaruhi hasil suara pemilihan umum legislatif dan eksistensi pemilihnya, yang dimana pada saat pemilihan umum legislatif 2019 suara dan kursi partai politik Islam mengalami perubahan suara yang sangat signifikan dalam hal perolehan jumlah suara dan kursi anggota legislatif dari sisi pelembagaan partai politik Islam secara keseluruhan. Parpol Islam yang mengalami kenaikan perolehan jumlah suara dan kursi legislatif yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketika pemilihan umum legislatif 2014 mendapatkan tiga kursi namun pada pemilihan umum legislatif 2019 mendapatkan lima kursi sedangkan partai politik Islam yang mengalami penurunan perolehan jumlah suara dan kursi legislatif yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ketika Pemilu legislatif 2014 mendapatkan dua kursi, namun pada pemilihan umum legislatif 2019 hanya tersisa mendapatkan satu kursi.

Dari uraian di atas keinginan penulis ingin mengangkat bagaimana sistem pelembagaan partai politik Islam yang terjadi di dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang. Mengapa memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena kedua Parpol Islam tersebut, merupakan partai Islam yang bertolak belakang dalam hal sikap maupun dukungan, dibuktikan dengan PKS yang memilih berada dipihak berseberangan dengan pemerintah, sedangkan PPP berada dipihak pendukung pro pemerintah, tidak hanya itu saja PKS yang condong menganut paham islam fundamental dan konservatif cenderung mengadopsi pemikiran dan ajaran politik Islam Timur Tengah seperti gerakan *Ikhwanul Muslimin* (merupakan salah satu bagian dari organisasi umat Islam, mengajak dan menuntut ditegakannya syariat Allah SWT yang berdomisili di Kairo, Mesir).

## **TINJAUAN LITERATUR**

Penelitian mengenai partai politik Islam sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Yudi Purwanto (Purwanto, 2009) menyimpulkan bahwa pada dasarnya partai politik Islam diharapkan mampu menjadi alat perjuangan penyalur aspirasi dan membela hak-hak kepentingan umat Islam dalam parlemen.

Dalam penelitian Joko Raharjo tentang “Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Memperjuangkan Aspirasi Umat Islam. (Studi Kasus PPP Periode 1999-2009 di Kabupaten Klaten)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPP di Klaten banyak hal yang telah berperan aktif terhadap masyarakat di Kabupaten Klaten baik dari sisi kegiatan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan yang ada dan memperjuangkan aspirasi untuk memperoleh kesejahteraan. (Raharjo, 2010)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Gelora Mahardika dan Sun Fatayati yang berjudul “Perubahan Perilaku Pemilih (*Voting Behaviour*) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia” penelitian ini mengkaji fenomena merosotnya suara pemilih partai politik Islam yang ada di Indonesia. Mengingat sejarah masa lampau, partai politik Islam pernah mengalami fase kejayaan atau keberhasilan dibuktikan dengan banyak mencatat tokoh-tokoh partai Islam memiliki pengaruh besar di Indonesia, namun saat ini partai politik kurang dilirik oleh pemilih bahkan sering terdegradasi dalam hal suara maupun pemilih dan kursi ketika menghadapi pertarungan Pemilu legislatif. (Mahardika, 2019)

Sudarno Shobron melakukan penelitian yang berjudul “Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Partai Islam pernah mengalami kejayaan pada tahun 1955 yang dilakukan oleh Masyumi dan NU, bahkan juga pernah dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1977. Pada zaman Reformasi banyak bermunculan partai baru terkhusus partai yang beraliran Islam, misalnya Partai Bulan Bintang (PBB) yang sebelumnya bagian dari Masyumi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang awalnya bernama Partai Keadilan (PK), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beberapa partai Islam ini telah lolos proses verifikasi untuk mengikuti pemilihan umum legislatif, ada juga partai nasionalis yang memiliki basis pemilih ormas Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN) mayoritas basis Ormas Muhammadiyah dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mayoritas berbasis Nahdlatul Ulama (NU). (Shobron, 2013)

Dalam penelitian yang dilakukan Triono yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Menurunnya Perolehan Suara Parpol Islam Pada Pemilu 2014” hasil penelitian ini adalah bagaimana terjadinya dinamika partai politik Islam dalam kontestasi demokrasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang plural bukan hanya terdapat orang Islam saja, didalamnya ditemukan kemajemukan menyebabkan partai Islam gagal bersaing. Selain itu juga dapat dilihat pada *track record* keikutsertaan partai politik Islam dalam perjalanan pemilihan umum legislatif di Indonesia saat itu. Perolehan suara Parpol Islam yang cenderung menurun sejak zaman reformasi. (Triono, 2015)

## **METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara atau suatu langkah yang dipakai, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana dan sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah metode, untuk mencari akar permasalahan dari suatu hal. Dengan demikian metode penelitian adalah cara atau tahapan yang harus dilalui kegiatan penelitian yang terencana dan sistematis untuk mencari akar permasalahan yang diteliti untuk menjawab penelitian dengan hasil. (Moleong, 2002)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) atau penelitian dengan metode kualitatif, karena dianggap paling sesuai digunakan untuk penelitian ini, dimana penelitian kualitatif ini merupakan suatu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. (Juliansyah Nur, 2011) Dimana metode kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan hasil penemuan yang diamati. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam dan menyeluruh mengenai suatu fenomena mengamati pelembagaan partai politik Islam di Kota Palembang. Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini berdasarkan atas hasil pengamatan dan hasil data wawancara yang diberikan dari para informan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penulian ini adalah menunjukkan bagaimana Pelembagaan Partai Politik Islam di Kota Palembang dengan studi kasus PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) proses pelembagaan ini menjelaskan berbagai aspek suatu partai politik Islam dapat dikatakan sudah atau belum terlembaga dilihat dari sebagai berikut. Pertama, derajat kesisteman (*systemness*). Kedua, derajat identitas nilai (*value*

*infusion*). Ketiga, derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*). Keempat, derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*).

Alasan tersebut didasarkan bahwa konsep pelebagaan yang diuraikan oleh mereka merupakan hasil perpaduan dari konsep pelebagaan partai yang dikemukakan oleh para ahli. Selain itu, dalam konsepsi ini mencakup pelebagaan internal dan eksternal partai politik. Konsepsi mengenai pelebagaan partai yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand ini kemudian dielaborasi lebih mendalam oleh penulis kali ini.

Pelebagaan Parpol Islam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang, melakukan penataan internal organisasi untuk mencapai tujuan tersebut, pada bab ini diuraikan mengenai tiga indikator untuk mengukur pelaksanaan fungsi-fungsi pelebagaan partai politik tersebut, yaitu sistem dan kaderisasi partai, penerapan demokrasi internal partai, serta kohesivitas (keutuhan) partai.

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Palembang melaksanakan menerapkan demokrasi di internal partai untuk senantiasa berpedoman pada mekanisme prosedur yang ada. Hal itu dilakukan untuk memberikan peluang kepada seluruh anggota dan pengurus untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Bukan hanya dalam penerapan aturan-aturan dalam partai, tetapi juga berlaku dalam semua proses pengambilan kebijakan.

Oleh karenanya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Palembang sendiri lebih mengedepankan proses musyawarah dalam membuat aturan maupun dalam perumusan kebijakan tertentu. Menurut prosedur yang ada, bahwa beberapa kebijakan dapat ditentukan sendiri oleh kader maupun pengurus daerah, juga ada yang harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari level yang lebih tinggi (dalam hal ini Pengurus Tingkat Provinsi dan Pengurus Nasional).

Jika kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan tidak terlalu urgen dan strategis, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Palembang biasanya melakukan rapat pengurus, misalnya dalam menentukan panitia-panitia kegiatan partai. Untuk menjaga terjaminnya proses demokrasi dalam partai, senantiasa diupayakan melaksanakan rapat konsolidasi tiap bulan di Kantor Dewan Pengurus Daerah Tingkat Kota. Namun untuk kebijakan-kebijakan yang strategis dan urgen, misalnya dalam penentuan daftar calon legislatif, penentuan pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD, serta Pergantian Antar Waktu (PAW) maupun dalam penentuan Calon Kepala Daerah biasanya diputuskan melalui rapat pleno atau rapat pleno diperluas. Hasilnya kemudian diserahkan ke level yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan. Walaupun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu, diperlukan adanya masukan-masukan dan saran dari tokoh-tokoh partai dalam setiap perumusan kebijakan.

Hal ini sudah tertuang dalam AD/ART Partai, sehingga dalam ketentuan tersebut struktur kepengurusan partai dilengkapi dengan Dewan Pertimbangan Partai meskipun bukan berarti Dewan Pertimbangan ini memiliki kekuatan utama dalam penentuan kebijakan, hanya terbatas untuk memberikan saran. Kecenderungan intervensi dari Dewan Pengurus Wilayah Tingkat Provinsi dan Dewan Pengurus Pusat memang masih ada dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh Pengurus Tingkat Kota, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Palembang. Karena memang menurut prosedur yang berlaku dalam partai, beberapa kebijakan strategis harus dikonsultasikan atau dilaporkan ke level di atasnya untuk mendapatkan persetujuan dan

pengesahan. Seperti dalam penentuan daftar calon legislatif, penentuan pimpinan fraksi di DPRD, serta Pergantian Antar Waktu (PAW) maupun dalam penentuan calon kepala daerah. Walaupun pada hakekatnya hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Kota Palembang, tinggal memperoleh persetujuan dan pengesahan, sepanjang mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam prosedur organisasi.

Selanjutnya dominasi segelintir elit partai dalam proses penerapan aturan dan kebijakan yang masih terjadi, terutama unsur pimpinan partai. Walaupun mekanisme musyawarah tetap dikedepankan, namun kepentingan-kepentingan elit partai masih sering mengiringi kebijakan-kebijakan tertentu. Selain itu, pelibatan dan pendelegasian kewenangan terhadap beberapa pengurus juga masih kurang.

Sehingga pengurus yang ada, kadang hanya menerima perintah ketika keputusan itu telah ditetapkan. Dalam artian bahwa pengurus yang ada tidak dioptimalkan untuk melakukan inovasi program sesuai dengan bidangnya masing-masing. PKS dalam demokrasi internal terletak pada nama statuta kepengurusan majelis dalam hal pengambilan keputusan seperti PKS yang terdiri dari Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Pertimbangan, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah. (Ridwan Saiman, 2020)

Seperti yang terjadi didalam tubuh PKS dimana konflik Sohibul Iman (Presiden PKS) dan Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR-RI 2014-2019) yang dipecat dari struktur kepartaian PKS lalu mendirikan organisasi masyarakat Garbi (Gerakan Arah Baru Indonesia) lalu berubah menjadi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia) juga berdampak terhadap DPD PKS Kota Palembang hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa pengurus struktur inti PKS yang pindah ke Partai Gelora Indonesia seperti Amril Sudiono yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Kadersisasi PKS, kini pindah ke Partai Gelora Indonesia.

Walaupun terjadi konflik antar sesama pengurus struktural PKS namun hal tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan jumlah suara dan kursi PKS pada Pemilu legislatif Kota Palembang 2019 lalu. Justru PKS mengalami lonjakan kenaikan suara dan kursi dimana pada Pemilu 2014 lalu PKS mendapatkan tiga kursi dengan jumlah suara 42.965 sedangkan pada Pemilu 2019 mendapatkan lima kursi dengan jumlah suara 64.570 hal ini menunjukkan konflik perpecahan dan perpindahan kader tidak mempengaruhi hasil Pemilu 2019. (Mikail, 2015)

Terkait dengan standar rekrutmen anggota dan pengurus di internal secara prosedural telah diatur dalam AD/ART partai. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang, jumlah kader PKS kota Palembang lebih kurang 2413 kader yang terdiri dari 707 laki-laki dan 1706 perempuan. Jumlah seluruh pengurus Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang pada periode 2010- 2015 yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan terbagi menjadi delapan bidang yaitu bidang kaderisasi, bidang pengembangan keumatan, bidang kependuan dan olahraga, bidang generasi muda dan profesi, bidang perempuan, bidang pengembangan ekonomi kewirausahaan, bidang kelembagaan sosial, bidang kebijakan public. (Kasim, 2020) Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader, dimana inti dari kekuatan partai ini berasal dari para kader-kademya Sesuai dengan AD-ART PKS Bab IV pasal 9 yaitu setiap Warga

Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan republik Indonesia yang berlaku. Sistem kaderisasi pada PKS berjenjang sesuai dengan tingkat kualitas dan loyalitas kadernya, adapun tingkatannya adalah :

- a. Anggota kader pendukung/terbina, yang terdiri :
  - 1) Kader Pemula, yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai.
  - 2) Kader Muda, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan telah lulus pada pelatihan kepertaian tingkat dasar pertama.
- b. Anggota kader inti, yang terdiri:
  - 1) Kader Madya. yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPD dan telah lulus pada pelatihan kepertaian tingkat dasar kedua
  - 2) Kader Dewasa, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan telah lulus pada pelatihan kepertaian tingkat lanjut.
  - 3) Kader Ahli, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan telah lulus pada pelatihan kepertaian tingkat tinggi.
  - 4) Kader Purna. yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPP dan telah lulus pada pelatihan Kepertaian tingkat ahli.
  - 5) Kader Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat

Ada sebanyak 121 pengurus Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang pada periode 2010-2015, diantaranya anggota pengurus Majelis Pertimbangan Daerah yang berjumlah 6 orang, pengurus Dewan Syariah Daerah yang berjumlah 7 orang, dan Dewan Pengurus Daerah berjumlah 109 orang dan 7 biro dan 12 bidang di Partai Keadilan Sejahtera dan 16 DPC sudah terbentuk dengan baik sementara struktur DPR belum terbentuk. Cara PKS dalam menjaga kader memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) seperti kegiatan pengajian rutinitas mingguan yang disebut *liqo* atau *khalaqoh* dan menurut konstitusi partai (AD/ART) yang mengikuti proses jenjang karir Training dalam hal kaderisasi partai.

Randall dan Svasand (2002) mengemukakan bahwa penanaman nilai (*value infusion*) merujuk pada suatu kondisi di mana para aktor partai politik yang berada di dalam partai dan konstituennya mendapatkan mampu mengidentifikasi dan memiliki komitmen terhadap partai. Keberhasilan suatu partai menanamkan nilai-nilai ideologis dan platform identitas gerakan yang jelas kepada para anggotanya akan berimplikasi terhadap komitmen pendukung dalam memperjuangkan partai. Para anggota tersebut akan senantiasa berjuang sesuai dengan identitas, ideologi, dan platform yang dimiliki partai. Implikasi selanjutnya dari penanaman nilai-nilai pula akan berdampak pada sejauhmana cara pandang dan sikap terhadap dirinya dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Suatu partai dianggap melembaga jika memiliki basis pendukung yang loyal



dan dukungan para anggota diberikan bukan atas pertimbangan material, tetapi karena orientasi politiknya sesuai dengan ideologi dan platform partai tersebut.

Basis pendukung terbesar Partai Keadilan Sejahtera di Kota Palembang seperti kegiatan yang dilakukan oleh PKS sendiri kerap dianggap sebagai partai Islam yang mayoritas pemilih dikalangan pemuda memiliki kedekatan dengan para Habaib, Ulama dan Ustadz serta simpatisan para massa aksi 212 yang dianggap kontra dengan pemerintah hal ini dibuktikan dengan bergabungnya kakak kandung dari Habib Mahdi Syahab pimpinan Front Pembela Islam (FPI) di Kota Palembang yakni Habib Idrus Rofiq yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PKS. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PKS di Kota Palembang yakni adalah Training Pengkaderan, Program Sosial Kemasyarakatan seperti penggalangan dana Palestina dan hadir memberikan bantuan ketika terjadi bencana alam ataupun musibah. Di Kota Palembang PKS memiliki banyak tokoh atau kader PKS yang memiliki pengaruh dan popularitas tinggi dari tokoh ulama, pengacara hingga akademisi seperti KH Iqbal Romzi, KH Tol'at Wafa, H. Yuswar Hidayatullah, (alm) Prof Buchari Rahman, M. Ridwan SaimanSH MH, Suhaely Ibrahim, LC, Salewangan Kasim LC, hingga Mgs A. Fauzan Yayan (cucu dari almarhum Kiyai Merogan ulama sekaligus pahlawan Kota Palembang).

Partai Keadilan Sejahtera memiliki kegiatan rutin setiap dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Adapun berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh kader Partai Keadilan Sejahtera, diantaranya melakukan pengajian di Majelis Ta'lim maupun aktifis kampus, kemudian melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pembinaan masyarakat yang berbentuk kuliner. Karena kader-kader Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera ini banyak yang memiliki kemampuan di dunia usaha dagang pempek, tempe, susu kedelai dan lain-lain.

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Palembang tidak hanya semata-mata mengajarkan politik saja melainkan diajarkan bagaimana cara membangun perekonomian keluarga. Pada tanggal 23 Maret 2017 di Hotel Aston Palembang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan perkumpulan para pengusaha kader-kader PKS se-Indonesia. Mereka berkumpul berdasarkan kemampuan di bidangnya masing-masing. Para kader yang sudah mempunyai usaha, mereka berusaha membantu kader-kader lain yang ingin membuka peluang bisnis.

PKS dalam hal ini pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan pemerintah maupun dengan sumber dana dari pemerintah, kader ataupun pengusaha dan sumber dukungan massa pemilih (organisasi masyarakat) diatur dalam AD/ART PKS. Pola hubungan suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa hampir memiliki kesamaan dimana setiap keputusan yang diambil melalui hasil musyawarah majelis partai, dalam hal dana PKS mendapatkan dana dari iuran kader, iuran anggota legislatif dan dana anggaran Partai Politik dari Pemerintah diperoleh berdasarkan jumlah suara dan kursi didapatkan dari instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

PKS menurut pengetahuan publik di Kota Palembang adalah sebagai partai islam dengan berpenampilan menggunakan atribut *syar'i* dan para kader anggota maupun simpatisan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap Palestina hal ini dibuktikan dengan banyaknya para kader simpatisan sering menggalang dana untuk Palestina, mayoritas pemilih PKS berasal dari gerakan tarbiyah, Rohaniawan Islam (Rohis), dan Lembaga

Dakwah Kampus (LDK) serta massa simpatisan aksi 212 yang kontra pemerintah dan kalangan habib dikarenakan faktor sosok Habib Salim Assegaff Al-Jufrie sebagai Ketua Majelis Syuro PKS yang menjadi panutan bagi para habib ulama lainnya. (Ridwan Saiman, 2020)

Sedangkan pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang, melakukan penataan internal organisasi untuk mencapai tujuan tersebut, pada bab ini diuraikan mengenai tiga indikator untuk mengukur pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, yaitu penerapan demokrasi internal partai, sistem dan kaderisasi partai, serta kohesivitas (keutuhan) partai.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang dalam pelaksanaan menerapkan demokrasi di internal partai untuk senantiasa berpedoman pada mekanisme prosedur yang ada. Hal itu dilakukan untuk memberikan peluang kepada seluruh anggota dan pengurus untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Bukan hanya dalam penerapan aturan-aturan dalam partai, tetapi juga berlaku dalam semua proses pengambilan kebijakan. Oleh karenanya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang sendiri lebih mengedepankan proses musyawarah dalam membuat aturan maupun dalam perumusan kebijakan tertentu. Menurut prosedur yang ada, bahwa beberapa kebijakan dapat ditentukan sendiri oleh kader maupun pengurus daerah, juga ada yang harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari level yang lebih tinggi (dalam hal ini Pengurus Tingkat Provinsi dan Pengurus Nasional).

Jika kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan tidak terlalu urgen dan strategis, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) di Kota Palembang biasanya melakukan rapat pengurus, misalnya dalam menentukan panitia-panitia kegiatan partai. Untuk menjaga terjaminnya proses demokrasi dalam partai, senantiasa diupayakan melaksanakan rapat konsolidasi tiap bulan di Kantor Pengurus Tingkat Kota. Namun untuk kebijakan-kebijakan yang strategis dan urgen, misalnya dalam penentuan daftar calon legislatif, penentuan pimpinan fraksi di DPRD, serta Pergantian Antar Waktu (PAW) maupun dalam penentuan Calon Kepala Daerah biasanya diputuskan melalui rapat pleno hasilnya kemudian diserahkan ke level yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan.

Walaupun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu, diperlukan adanya masukan-masukan dan saran dari tokoh-tokoh partai dalam setiap perumusan kebijakan. Hal ini sudah tertuang dalam AD/ART partai, sehingga dalam ketentuan tersebut struktur kepengurusan partai dilengkapi dengan Dewan Pertimbangan Partai. Meskipun, bukan berarti Dewan Pertimbangan ini memiliki kekuatan utama dalam penentuan kebijakan, hanya terbatas untuk memberikan saran.

Kecenderungan intervensi dari Pengurus Tingkat Provinsi dan Pengurus Nasional memang masih ada dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang. Karena memang menurut prosedur yang berlaku dalam partai, beberapa kebijakan strategis yang dilakukan oleh Pengurus Tingkat Kota harus dikonsultasikan atau dilaporkan ke level di atasnya untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Seperti dalam penentuan daftar calon legislatif, penentuan pimpinan fraksi di DPRD, serta Pergantian Antar Waktu (PAW) maupun dalam penentuan Calon Kepala Daerah. Walaupun pada hakekatnya hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh Pengurus Tingkat Kota (DPC PPP), tinggal

memperoleh persetujuan dan pengesahan, sepanjang mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam prosedur organisasi.

Selanjutnya dominasi segelintir elit partai dalam proses penerapan aturan dan kebijakan yang masih terjadi, terutama unsur pimpinan partai. Walaupun mekanisme musyawarah tetap dikedepankan, namun kepentingan-kepentingan elit partai masih sering mengiringi kebijakan-kebijakan tertentu. Selain itu, pelibatan dan pendelegasian kewenangan terhadap beberapa pengurus juga masih kurang. Sehingga pengurus yang ada, kadang hanya menerima perintah ketika keputusan itu telah ditetapkan. Dalam artian bahwa pengurus yang ada tidak dioptimalkan untuk melakukan inovasi program sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang, dalam demokrasi internal dalam hal pengambilan keputusan yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang. Seperti yang terjadi dalam Dewan Pengurus Cabang PPP Kota Palembang, meskipun kadang muncul faksi-faksi di dalam partai, namun munculnya faksi tersebut tidak sampai mengganggu keutuhan organisasi. Faksi-faksi yang muncul akibat kekecewaan terhadap kebijakan partai, senantiasa ditanggapi sebagai bagian dari dinamika politik partai terjadinya faksi atau perpecahan dalam tubuh partai. Karena pada dasarnya, perpecahan sering terjadi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi di antara pengurus, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada kekecewaan kepada sebagian anggota atau pengurus PPP.

Meskipun diakui oleh RHM Syafruddin pengurus bahwa perpecahan yang ada dalam tubuh Dewan Pengurus Cabang PPP Kota Palembang sampai menimbulkan konflik internal, seperti terdapat dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP, dimana terdapat dua ketua umum partai seperti yang terjadi pada Oktober tahun 2014 lalu, dimana terdapat dua muktamar yang terjadi saat itu muktamar di Jakarta dan Surabaya. Muktamar Jakarta memilih Djan Faridz sebagai Ketua PPP sedangkan muktamar Surabaya memilih Romahurmuziy sebagai Ketua PPP namun jika itu terjadi maka ada mekanisme dan prosedur tertentu untuk menyelesaikan konflik. Untuk kasus Partai dalam upaya penanganan konflik, juga senantiasa berpedoman pada mekanisme yang telah ditentukan oleh aturan partai. Namun demikian, pengalaman yang pernah dialami oleh dengan perpecahan internal, diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan. Dalam kasus ini, kehadiran tokoh kharismatik partai menjadi sangat berarti dalam menjembatani upaya penyelesaian perpecahan yang terjadi.

PPP Kota Palembang mengalami penurunan suara dan kursi di mana pada pemilu 2014 lalu PPP mendapatkan 2 kursi yakni atas nama Desmana Akbar, A.Md (Ketua DPC PPP Kota Palembang) dan H. Syahril Eddy dengan jumlah keseluruhan suara PPP 44.796 sedangkan pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Palembang. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang hanya mendapatkan 1 kursi atas nama Drs H Faidol Barokat, M.Pd dengan jumlah keseluruhan suara PPP 33.103 hal ini menunjukkan konflik perpecahan dan dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepengurusan mempengaruhi hasil pemilu 2019.

Terkait dengan standar rekrutmen anggota dan pengurus di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang, secara prosedural telah diatur dalam AD/ART PPP. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari kantor Dewan Pimpinan

Cabang PPP Kota Palembang yang beralamat, di Jalan Merdeka Nomor 685, adapun struktur pengurus berjumlah 90 orang kurang lebih Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Palembang yakni adalah Desmana Akbar, A.Md (Ketua / 19 Wakil Ketua), Dewi Maya Komalasari, SE (Sekretaris / 19 Wakil Ketua) dan Abdul Karim SH (Bendahara / 2 Wakil). Majelis Syariah (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretarsi, Dan Bendahara), Majelis Pertimbangan (Ketua / 5 Wakil Dan Sekretaris / 5 Wakil) Dan Majelis Pakar (Ketua / 5 Wakil Dan Sekretaris / 5 Wakil) serta Ketua Ranting di 18 Kecamatan. Dalam hal kaderisasi partai setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta *khithah* dan program perjuangan PPP dapat menjadi anggota PPP terdiri atas: anggota biasa, anggota kader, dan anggota kehormatan.

Basis pendukung terbesar dari PPP merupakan partai politik Islam yang kulutural di kota Palembang karena mayoritas kader dan pengurus PPP memiliki ikatan dengan para ulama atau kiyai sepuh senior di Kota Palembang hal ini dibuktikan dengan tokoh ulama senior yang terpilih menjadi DPRD dari PPP seperti Drs Faidol Barokat M.Pd PPP dikenal sebagai partai politik yang memiliki simbol kakkah dengan warna hijau, saat ini massa atau keanggotaan dari PPP beragam mulai dari NU (Nahdlatul Ulama), SI (Syarekat Islam) dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Mayoritas pemilih PPP berasal dari Kiyai Pondok Pesantrean dan kalangan pegawai dan pensiunan Kementerian Agama Kemenag (Kemenag) hal ini dikarenakan 10 tahun terakhir menteri agama berasal dari PPP, sedangkan satu-satunya anggota DPRD Kota Palembang dari hasil Pemilu legislatif 2019 yang terpilih dari PPP yakni Drs Faidol BarokatM.Pd yang merupakan Pensiunan PNS Kemenag Kanwil Sumatera Selatan.

PPP menurut pengetahuan publik di Kota Palembang adalah sebagai partai Islam dengan berlambang kakkah dan simbol warna hijau dikenal sebagai partainya para kiyai sepuh atau senior. Adapun para kader anggota, simpatisan dan pengurus hingga pemilih PPP merupakan anggota ormas Islam seperti NU, MI, Perti dan SI. Adapun ketokohan kiyai senior sangat dituahkan dalam PPP seperti KH Maimoen Zubair, namun di Palembang kiyai sangat dituahkan adalah KH Mal'an Abdullah, KH Zaini Husein Umrie dan lain sebagainya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dan uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian skripsi ini, maka Pelembagaan Partai Politik Islam di Kota Palembang. Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat peneliti simpulkan sebagai berikut dibawah ini:

### **Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang**

Pelembagaan partai politik Islam Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang, bisa dikatakan terlembaga karena mampu menjawab empat dimensi atau derajat yang ada dalam teori Randall dan Svasand. Hal ini dibuktikan dengan PKS yang mampu mempertahankan eksistensi pendukung massanya maupun pemilihnya, walaupun mengalami konflik internal di kepengurusan. Dalam hal kaderisasi PKS mampu mengelolah kader mulai dari tahapan rekrutmen hingga jenjang karir tingkat atas baik untuk pengurus struktur maupun anggota legislatif.

Pendiri PKS Kota Palembang sebagian besar merupakan alumni Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan pertama kali didirikan pada tanggal 2 Juli 2003 dideklarasikan di aula Universitas PGRI Palembang dipimpin oleh H. Jonni Yulianto, ST MM (ketua), Taufik Hidayat, ST (sekretaris), dan M Fahmi Agussalam (bendahara) sekretariatnya di Jalan Parameswara Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Ketika Pemilu legislatif tahun 2004 PKS Kota Palembang saat itu berhasil memperoleh lima kursi legislatif dengan capaian (11% suara) dari lima daerah pemilihan yang terdapat di Kota Palembang.

Identitas PKS sebagai partai Islam yang fundamental sangat melekat, dikarenakan dianggap dari bagian gerakan tarbiyah *Ikhwanul Muslimin* di Mesir dibuktikan dengan banyaknya kader dan simpatisan PKS yang berada di LDK menganut sistem *liqo* sering diadakan dalam masjid kampus dan mengidolakan sosok Hassan Al-Banna (Ketua *Ikhwanul Muslimin*). Dekatnya PKS Kota Palembang terhadap para kalangan ulama, habaib dan umat Islam pendukung 212 seperti KH Mgs Ahmad Fauzan Yayan (keturunan dari Kiyai Muara Ogan pahlawan sekaligus ulama besar Palembang) dan Habib Idrus Rofiq anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi PKS yang merupakan kakak kandung dari Habib Mahdi Syahab (Ketua FPI Sumsel).

Dalam hal pengambilan keputusan PKS Kota Palembang selalu mengedepankan sistem musyawarah atau *syuro* yang dipimpin oleh Ketua Majelis *Syuro* baik dalam hal rekomendasi koalisi dukungan calon kepala daerah maupun penentuan pimpinan legislatif baik ketua fraksi maupun komisi. Citra PKS di mata publik juga baik dikarenakan PKS selalu hadir melakukan aksi solidaritas Islam dan memberikan bantuan ketika dalam bencana alam maupun bencana lainnya di Kota Palembang.

### **Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang**

Pelembagaan partai politik Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang, bisa dikatakan belum terlembaga karena belum mampu menjawab empat dimensi atau derajat yang ada dalam teori Randall dan Svasand. Hal ini dibuktikan dengan PPP Kota Palembang tidak mampu mempertahankan eksistensi pendukung massanya maupun pemilihnya dikarenakan mengalami konflik internal dualisme di kepengurusan, dalam hal kaderisasi PPP sudah baik mengelolah kader mulai dari tahapan rekrutmen hingga jenjang karir tingkat atas baik untuk pengurus struktur maupun anggota legislatif.

Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang tidak terlepas sejak adanya kebijakan pemerintah Orde Baru tentang fusi partai, tokoh-tokoh politik partai Islam di Kota Palembang seperti Husin M.S (MI), Taher Arbai (SI), Abdullah Abubakar (MI), Husin Umrie (NU), Fajri Mardena (SI), KH Daud Hamidin (NU), KH Mawardi (Perti) sepakat bersama-sama mendeklarasikan untuk bergabung atau memfusikan dalam satu wadah politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di sekretariat organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang berada di Jalan Letkol. Iskandar No. 901 Kota Palembang dari deklarasi tersebut diusulkan ke DPP PPP melalui rekomendasi DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Sumatera Selatan, dalam beberapa bulan keluarlah SK DPP PPP No 10 tahun 1973.

Identitas PPP sebagai partai Islam sangat melekat dikarenakan dekatnya PPP terhadap para kalangan ulama tradisional kultural di Kota Palembang namun kesalahan fatal PPP dikarenakan PPP Pusat ketika Pilkada DKI Jakarta 2017, memilih mendukung

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap Penista Agama sehingga sebagian ulama dan umat Islam memilih keluar dari PPP di Kota Palembang dan kehilangan simpatisan maupun pemilihnya ketika Pemilu legislatif Kota Palembang tahun 2019 .

Dalam hal pengambilan keputusan PPP di Kota Palembang juga selalu mengedepankan sistem musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syariah dan Majelis Pertimbangan. Citra PPP dimata publik juga baik dikarenakan PPP sebagai partai Islam dengan berlambangkan kubah dan simbol warna hijau dikenal sebagai partainya para kiyai sepuh atau senior seperti KH Maimoen Zubair, namun di Palembang kiyai sangat dituahkan adalah KH Mal'an Abdullah, KH Zaini Husein Umrie dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin, 2001, *Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Burhan Bungin, 2010 *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Efriza. *Political Explore : Sebuah Kajian Politik*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Idris Thaha, 2004, *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Joko Raharjo, 2010, Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Memperjuangkan Aspirasi Umat Islam (Studi PPP Periode 1999-2009 di KabupatenKlaten). *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Lexi J Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya,
- Lisa Harrison, 2006, *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Mahardika, A. G., & Fatayati, S. (2019). Perubahan Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(2), 241-254. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i2.720>
- Lili Romli. Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde-Baru. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*. Vol 5, No 1 Tahun 2008.
- Mikail, Kiki. “PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019”. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 15, no. 1 (April 7, 2016): 107-148. Accessed February 7, 2021. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/444>.
- Rasyid Ridha, S., dkk, 2003, *PPP 30 Tahun Bersama Ummat*. Jakarta : DPP PPP
- Rosady Ruslan, 2017, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta
- Rowdotusya’adah, 2018, Pelembagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi Tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum Dalam Partai Demokrat). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Samuel Huntington, 1983, *Tertib Politik Didalam Masyarakat Yang Sedang Berubah* Jakarta : CV. Rajawali, 1983.
- Septiyanti, A. (2020). Political Marketing dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 (Studi Kasus Tim Pemenangan Herman Deru-Mawardi Yahya di Kota Palembang). *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(1), 14-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ampera.v1i1.5184>
- Sudarno Shobron. Prospek Partai Islam Ideologi. *Jurnal Studi Islam*. Profetika, Vol. 14, No. 1, Juni Tahun 2013.
- Sugiyono, 2004, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Triono. Faktor-Faktor Penyebab Menurunnya Perolehan Suara Parpol Islam Pada Pemilu 2014. *Jurnal*. Vol.11 No.1 Januari-Juni Tahun 2015.
- Umma Sekaran dalam Supranto, 2003, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta
- Yedi Purwanto. Masa Depan Partai Politik Islam dalam Pertarungan Pemilu 2009. *Jurnal Sosioteknologi Edisi* 16 Tahun 2009.